

DETERMINAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA

Dyah Ratnawati & Dhimas Marsna Galacia

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNV Jawa Timur

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepentingan keuangan dan hubungan usaha, pengaruh lamanya hubungan audit, pengaruh audit fee, pengaruh hubungan keluarga terhadap independensi akuntan publik di Surabaya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan 46 data responden diambil dengan metode random sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan keuangan dan hubungan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, lamanya hubungan audit tidak berpengaruh terhadap independen auditor, audit fee berpengaruh signifikan terhadap independen auditor, hubungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap independen auditor.

Kata Kunci: Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha, Lamanya Hubungan Audit, Audit Fee, Hubungan Keluarga

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dunia usaha disegala bidang yang semakin pesat memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik akan semakin membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menilai keandalan laporan keuangan.

Masyarakat profesi akuntan publik dapat melakukan penilaian laporan keuangan perusahaan secara independen, dapat dipercaya, tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. profesi akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan muncul sebagai akibat dari adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan investor sebagai principal, serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Profesi akuntan publik diharapkan bisa menjadi mediator antara agen dan principal dalam menjalankan perusahaan.

Keberadaan profesi akuntan publik pada sebuah perusahaan sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan klien, diharapkan mampu mengemukakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan menghindarkan principal dari kerugian sebagai pemilik dana perusahaan. Para pengguna laporan keuangan terutama adalah investor akan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh profesi akuntan publik sebagai sarana pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus diutamakan oleh auditor. Kualitas audit didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur dengan melalui beberapa pendekatan. De Angelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993), menggunakan pendekatan berorientasi hasil (outcome oriented) dan pendekatan berorientasi proses (process oriented) sebagai tolak ukur kualitas audit. Berdasarkan penjabaran pendekatan tersebut, pendekatan berorientasi proses lebih mampu memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur. Saat ini masyarakat belum bisa sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap akuntan. Krisis kepercayaan yang menimpa akuntan di Indonesia semakin terlihat jelas seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Masalah dalam ketidakpercayaan ini berhubungan erat dengan etika profesional para akuntan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Dalam Beberapa kasus yang merugikan pemakai laporan melibatkan akuntan publik yang seharusnya menjadi pihak yang independen. Kasus yang melibatkan akuntan publik salah satunya terdapat pada artikel yang berjudul Mitra Ernst & Young Indonesia Didenda 13 Miliar di AS ” dalam bisnis.tempo.co tanggal 11 Februari 2017. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono,

Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan

kliennya. Anggota jaringan EY Ernst & Young's (EY) di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.

KAJIAN TEORITIS

Profesi Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal di kalangan masyarakat, dari jasa audit yang disediakan yaitu sebagai pelaksana audit atas laporan keuangan, yang berguna bagi pemakai informasi keuangan. Akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa kepada masyarakat luas, terutama masyarakat dari kalangan bisnis dengan cara membuat kontrak-kontrak kerja. Akuntan publik juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011. Tentang akuntan publik dan pengaturan menteri keuangan Nomor 443/KMK.01/2011. Mengenai penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia berfungsi sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 43/KMK.017/1997 yang dimaksud akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang audit umum, audit khusus, attestasi dan review. Akuntan publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, perpajakan dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002, Tentang Jasa Akuntan Publik, seseorang disebut sebagai Akuntan Publik bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan: (a) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan ijin Akuntan Publik; (b) berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan; (d) anggota IAI dan IAI-Kompartemen Akuntan Publik yang dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan; (e) lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAI; (f) memiliki pengalaman kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan mensupervisi pekerjaan audit umum, yang disahkan oleh Pimpinan KAP tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon I Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang audit umum; (g) melengkapi formulir AP-1. Dari uraian di atas, maka akuntan publik harus kompeten dan independen dalam menjalankan tugasnya, yang mempunyai arti, bahwa tanggung jawab untuk berperilaku lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan dapat memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien dan rekan seprofesinya, termasuk untuk berperilaku yang terhormat

yang merupakan pengorbanan pribadi. Perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik adalah penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lain yang diberikan

Kode Etik

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang berkepentingan lainnya. Kode etik berupa aturan umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturanaturan khusus yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi diharapkan dapat membantu para akuntan publik untuk mencapai mutu pemeriksaan pada tingkat yang diharapkan. Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh

masyarakat, maka harus patuh pada prinsip-prinsip etik sebagaimana dimuat dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia tahun 1998, yaitu:

Prinsip kedua adalah kepentingan publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip ketiga adalah integritas. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Prinsip keempat adalah obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip keenam adalah kerahasiaan. Prinsip ketujuh adalah perilaku profesional. Prinsip kedelapan adalah standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan

Independensi

Tanggung jawab yang besar merupakan suatu hal yang penting bagi akuntan publik yang bekerja di suatu kantor akuntan publik untuk memiliki independensi dan keahlian yang tinggi jika akuntan tidak independen terhadap manajemen kliennya, pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti. Menurut Dalam Seprian (2007) menyebutkan independensi akuntan publik mencakup dua aspek yaitu : (1)independensi sikap mental dan (2) independensi penampilan. Setiap akuntan harus menjaga integritas dan keobjektivan dalam tugas profesional dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang berpengaruh atau tidak layak Menurut Mautz dan Sharaf (1993) menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi, independensi, dan profesional . mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah penting. Tetapi juga yang penting adalah bahwa pemakai laporan keuangan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi tersebut.

Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien

Akuntan publik harus bebas dari ikatan keuangan dan hubungan usahadengan klien yang diperiksa, jika tidak akan mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Code of Professional Ethics (Rule 101

Independence) menyatakan bahwa : Seorang auditor atau kantor akuntan publik yang bertindak sebagai partner atau pemegang saham tidak boleh menyatakan suatu pendapat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan kecuali ia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut .

Selanjutnya, rule tersebut menyatakan bahwa independensi akuntan publik di anggap lemah apabila : (a) Selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan pendapatnya, dia atau pun kantornya : Memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksa, atau sebagai trustee, atau eksekutor, atau administrator satu atau beberapa “estate” yang memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksanya. atau Memiliki investasi bersama di dalam bisnis dengan perusahaan yang diperiksanya atau dengan karyawan yang penting, direktur utama atau pemegang saham utama perusahaan yang diperiksa yang jumlahnya material dalam hubungannya dengan kekayaan bersih kantornya, atau Mempunyai hutang atau piutang pada perusahaan yang

diperiksanya atau karyawan penting atau pemegang saham utama . Hutang atau piutang ini tidak mencakup hutang atau piutang akuntan pemeriksa atau kantornya kepada lembaga keuangan yang diperiksanya jika utang atau piutang tersebut melalui prosedur, jangka waktu dan syarat-syarat yang normal : (a) hutang yang diperbolehkan akuntan atau kantor akuntannya yang tidak material dihubungkan dengan kekayaan bersih peminjam , (b) hipotik rumah, (c) hutang lain yang dijamin, kecuali hutang yang dijamin oleh kantor akuntan pemeriksa yang tidak cukup jaminannya .Didalam periode laporan keuangan, selama periode kontrak kerja pemeriksaan atau saat menyatukan pendapat, dia atau kantor akuntannya : (1) Bertindak sebagai promoter, penjamin emisi surat

berharga, direktur atau karyawan penting atau dalam kedudukannya setara dengan anggota manajemen atau karyawan penting perusahaan yang diperiksa, atau (2) Sebagai trustee dana pensiun atau “profitsharing trust” perusahaan yang Lamanya Hubungan Audit

Lamanya hubungan audit dengan klien disebut juga audit tenure. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 tahun berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor

akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). Lamanya hubungan KAP dengan klien dalam memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari perusahaan klien akan memberikan pengaruh berupa hilangnya independensi auditor. Hubungan yang terlalu lama dapat mengakibatkan identifikasi yang erat dari kantor audit yang sesuai dengan kepentingan perusahaan klien yang merupakan indikasi, bahwa independensi akan semakin sulit untuk ditegakkan. Dalam beberapa kasus, ancaman kuatterhadap independensi auditor adalah timbulnya pengikisan yang berjalan pelandan bertahap terhadap obyektivitas yang jujur. Arogansi, kurangnya inovasi, prosedur audit yang kurang tegas dan kepercayaan intelektual pihak klien akan membuat hubungan itu berlangsung. Beberapa kritik menyatakan, bahwa terdapat kepentingan terselubung yang mendukung pernyataan, bahwa auditor mungkin mengkompromikan independensinya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan hubungan langsung guna meningkatkan biaya audit yang diterima, jika perusahaan klien memberikan peluang mendapatkan jasa (Sunasti, 2012).

Audit Fee

Saat membicarakan tentang hubungan antara besarnya biaya jasa audit dan independensi auditor, biaya jasa audit yang besar berhubungan dengan makin tingginya risiko melemahnya independensi auditor. Accountant International Study Group (1976) merekomendasikan, bahwa auditor harus menahan diri dari menerima pemberian apapun dengan jumlah ongkos jasa audit sebesar 10 per sen atau melebihi total pendapatan audit. Selain itu IFAC (International Federation of Accountant, 1996, 8.7) Code of Ethics for Professional Accountants dan EFAA (E-Uropean Federation of Accountants and Auditor, 1998) menyatakan, bahwa ukuran atau besarnya perusahaan klien (yang diukur dari besarnya biaya audit) dapat meningkatkan perhatian terhadap independensi auditor, namun tidak menyebutkan berapa total biaya yang dapat diterima oleh auditor. EFAA (1998, 4) dengan jelas menyatakan, bahwa total biaya dari seorang klien kepada auditor sebaiknya tidak melebihi persentase total perputaran uang dalam kantor akuntan publik. Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima fee selain yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, adanya fee bersyarat dan menerima fee yang jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia telah mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain fee dalam kontrak dan fee bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Kode etik tersebut menjelaskan “Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain hononarium untuk penugasan bersangkutan. Hononarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya”. Kode etik sebaiknya dapat memberikan panduan untuk membatasi ketergantungan yang berlebihan dari seorang auditor pada klien dalam hal pendapatan yang mereka terima. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England & Wales) sudah mengatur, bahwa ukuran atau besarnya biaya jasa audit dari klien berukuran besar sebaiknya tidak melebihi 15 per sen dari total biaya, untuk menghindari makin melemahnya independensi auditor. Kriteria 15 persen ini secara umum digunakan di Australia oleh para

auditor untuk mempertimbangkan posisinya yang harus tetap independen, namun ada pendapat yang menyatakan, bahwa nilai 15 per sen ini terlalu rendah.

Hubungan Keluarga

Penelitian yang dilakukan oleh supriyadi, ahmar, wilopo (2002) dan suyatmini (2002). Supriyati, nurmala ahmar, wilopo (2002) mengidentifikasi 7 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dimana salah satunya adalah hubungan keluarga. Penelitian ini mengambil perusahaan go public yang berada di Surabaya. Hubungan yang timbul karena keluarga sedarah atau perkawinan dengan klien dapat menimbulkan keadaan yang mengurangi bahkan merusak independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Selain itu independensi auditor dianggap lemah jika terdapat ikatan kepentingan keuangan yang signifikan yang dilakukan oleh keluarga dekat auditor yang bersangkutan dengan kliennya.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka peneliti, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : kepentingan keuangan & hubungan usaha berpengaruh positif terhadap independensi auditor

H2 : lamanya hubungan audit berpengaruh positif terhadap independensi auditor

H3 : audit fee berpengaruh negatif terhadap independensi auditor

H4 : hubungan keluarga berpengaruh negatif terhadap independensi auditor

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

. Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen (Ghozali, 2013:7). Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Independensi Auditor (Y).

2. Variabel independen (X) Variabel Independen adalah variabel bebas yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Ghozali, 2013:7). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien (X1), lamanya hubungan audit (X2), Audit Fee (X3), Hubungan Keluarga (X4)

Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang dipakai untuk mengukur variabel bebas adalah dengan teknik Likert yang menggunakan skala ordinal. Adapun pengertian Skala Likert menurut Sugiyono (2014:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ordinal menurut Sugiyono (2014: 98) skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 80). Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah seluruh akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, dimana jumlah KAP di Surabaya berjumlah 41 (empat puluh satu) KAP pada tahun 2018. Berikut ini disajikan data mengenai akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya:

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sampel harus merupakan representatif dari sebuah populasi (Sumarsono, 2002:44-45). Untuk menentukan sampel yang digunakan objek penelitian digunakan metode simple random sampling. Selanjutnya, Arikunto (2009:11) menjelaskan bahwa simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa harus memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut.. Untuk mengetahui jumlah responden yang akan dijadikan sampel digunakan rumus Slovin,

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode survey, sehingga data yang digunakan berjenis data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yang dalam hal ini akuntan publik yang telah ditentukan. Data primer berupa pendapat responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam kuesioner dengan memberikan penilaian menggunakan skala Likert dengan memilih antara skor 1-5 dan skala Nominal dengan skor 1-2 sesuai uraian di atas yang telah dijabarkan dimana penyebaran kuesioner tersebut dibagikan secara langsung

TEKNIK ANALISIS DAN UJI HIPOTESIS

Teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis software SPSS (Statistic Program for Social Science).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Independen variable	T test	signifikansi
KKHK	- 1,292	0,208
KHA	- 1,292	0,052
AF	- 2,477	0,020
HK	3,285	0,003

Pembahasan

Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha terhadap Independen Auditor

Independensi akuntan publik atau auditor dapat hilang jika mereka memiliki kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis kegiatan keuangan dan hubungan usaha tersebut di antaranya selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai trustee atau eksekutor atau administrator atas satu atau beberapa “estate” yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang atau piutang pada perusahaan yang diauditnya, dan sebagainya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha tidak berpengaruh terhadap Independen Auditor. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya independensi dari seorang auditor tidak disebabkan oleh ada atau tidaknya kepentingan keuangan dan tinggi rendahnya hubungan usaha antara auditor dengan perusahaan klien. Serta hal tersebut tidak mengurangi dan menurunkan independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaanya Penelitian ini sejalan dengan penelitian Unggul J. (2016) yang mendapatkan hasil bahwa Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha tidak berpengaruh terhadap Independen Auditor

Lamanya Hubungan Audit terhadap Independen Auditor

Audit Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit - unit usaha perusahaan atau instansi. SEC Practice Section dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu menjadi dua yaitu lima tahun atau kurang, dan lebih dari lima tahun. Penggolongan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Lamanya hubungan antara audite dan auditor dapat mengganggu independensi auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Terganggunya independensi auditor disebabkan karena auditor tidak bisa lagi mempertahankan sikap objektif. Auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun serta

kurang dari 5 tahun tidak dapat menemukan kesalahan pelaporan yang materil (Mayangsari, 2005). Beberapa pihak telah beranggapan bahwa hubungan penugasan audit yang lama dan terus menerus dapat mengakibatkan rusaknya independensi. Semakin lama hubungan dengan klien semakin besar kemungkinan akuntan publik kehilangan objektivitas dan independensinya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel Lamanya Hubungan Audit tidak berpengaruh terhadap Independen Auditor. Sesuai dengan teori sikap dan perilaku etis yang mengindikasikan bahwa jika seorang auditor memiliki sikap sesuai dengan etika profesi yang berlaku, maka kinerja auditor yang dihasilkan akan semakin baik. Lamanya penugasan tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi, sebab auditor percaya bahwa suatu kantor akuntan publik yang menerima penugasan audit lebih dari yang ditetapkan yakni 5

tahun akan dapat menurunkan independensi karena penugasan yang terlalu lama akan membuat auditor dengan kliennya menjadi bukan sebagai rekan kerja namun sudah mengarah pada partner kerja dimana partner kerja selalu mendukung satu sama lain. Namun auditor juga percaya bahwa lama penugasan audit yang melebihi penetapan yakni 5 tahun dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi laporan yang diperiksa sebab lamanya hubungan audit akan menambah pengetahuan auditor mengenai keadaan kliennya. Berkaitan dengan hal tersebut lamanya penugasan audit bukanlah alasan bagi auditor untuk bersikap lebih independen ataupun tidak lebih independen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diana, Marsella dan Malem (2015) yang mendapatkan hasil bahwa variabel Lamanya Hubungan Audit tidak berpengaruh terhadap

Independen Auditor.

Audit Fee terhadap Independen Auditor

Besarnya audit fee menurut Bedard et al., 2008 yaitu Audit fee yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Sebaliknya, mungkin audit fee yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel Audit Fee berpengaruh secara negatif terhadap Independen Auditor. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai audit fee maka semakin menurun independensi auditor. Semakin besar nilai audit fee yang diterima oleh akuntan publik berhubungan dengan makin tingginya risiko melemahnya independensi auditor. Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima fee selain yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, adanya fee bersyarat dan menerima fee yang jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Dalam penelitiannya Hoitash et al. (2007) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif fee yang harus dibayarkan akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, yang mana konsesi resiprokal tersebut akan mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas auditor. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Mariyati , Siti dan Dicky (2016) mendapatkan hasil bahwa variabel Audit Fee berpengaruh terhadap Independen Auditor.

Hubungan Keluarga terhadap Independen Auditor

Dalam pernyataan Etika Profesional yang dinyatakan oleh Sukrisno Agoes (2004:303) bahwa” hubungan keluarga dan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas dan Independensi”. Dengan kata lain keadaan ini juga mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu independensi penampilan. Walaupun pada kenyataannya akuntan publik independent, maupun masyarakat meragukannya. Oleh sebab itu setiap penugasan untuk memberikan pendapat tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga dan pribadi. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu merupakan suami atau istri, anak, saudara sedarah sampai dengan garis kedua. Pengertian klien disini adalah pemilik perusahaan, pemegang saham, direksi dan eksekutif lainnya.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel Hubungan Keluarga berpengaruh secara positif terhadap Independen Auditor. Hubungan keluarga dekat dapat menimbulkan keadaan-keadaan lain yang merusak independensi penampilan. Hubungan yang timbul karena keluarga sedarah atau karena perkawinan dengan klien dapat menimbulkan keadaan yang akan mengurangi bahkan merusak independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Munawir dalam Novitasari (2004:74) menjelaskan bahwa Independensi seorang anggota (partner, auditor atau staf dari suatu kantor akuntan) dapat berkurang bila suami atau istri, anak-anak yang masih menjadi tanggungan anggota atau sanak saudara yang tinggal serumah atau yang hidupnya masih ditanggung oleh anggota tersebut memiliki posisi dengan klien yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijaksanaan operasi, keuangan atau akuntansi klien. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Unggul J. (2016) yang mendapatkan hasil bahwa Hubungan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Independen Auditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap independen auditor.
2. Variabel Lamanya Hubungan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap independen auditor
3. Variabel audit Fee berpengaruh signifikan terhadap independen auditor.
4. Variabel Hubungan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap independen auditor.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian lain seperti:

hubungan sosial, persaingan KAP, pemahaman etika audit, komite audit dan variable lain yang mungkin dapat mempengaruhi independensi akuntan publik. Peneliti selanjutnya perlu memperbaiki kualitas atau penampilan kuesioner agar responden tertarik untuk mengisinya

DAFTAR PUSTAKA

Bazerman, M.H, K.P. Morgan dan G. Loewenstein. 1997. "The impossibility of auditor Independence". Sloan Management Review, 38 (Summer): 89-94.

Bedard, Jean dan Michelene Chi T. H. 1993. Expertise in Auditing. Journal of Accounting Practice & Theory 12: 21-45.

DeAngelo, LE (1981). "Auditor Size and Auditor Quality". Journal of Accounting and Economics, Dec, Vol.3, No.3:183-199.

Dicky Arisudhana, Siti Mariyati. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1 No.2 (Oktober)

(<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>)(2017).

(<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/23/1501396/Beri.Kredit.Fiktif.Rp.102.Miliar.Tiga.Pegawai.BSM.Bogor.Ditangkap>) (2013)

Putri, Kirana, Hardi, Sem Paulus Silalahi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Audit (Study Survey pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru dan Batam)", 2013.

Standar Profesional Akuntan Publik SA seksi 220 Tahun 2011.

Setyono, Unggul J.. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Semarang). Semarang.

UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Diakses pada 10 Agustus 2018. <http://www.setjen.depkeu.go.id/download/ppajp/UUNo5Tahun2011tentangAkuntanPublik.pdf>.

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926072123-78-333248/kasus-snp-financedua-kantor-akuntan-publik-diduga-bersalah>) (2019).

(diakses 23 Maret 2019) <https://iapi.or.id/Iapi/detail/443>

Bedard et all, " Pengaruh Kompetensi dan Independsi Auditor terhadap Kualitas Audit" 2008

Holitash et al "Pengaruh audit tenure & Fee Audit terhadap fraud audit" 2007

Agoes, Soekrisno. 2004:303 , Auditing, Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik"

Munawir, Novitasari 2004, Analisis Laporan Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2004, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan(PSAK), Jakarta Salemba Empat

Mayangsari, 2005. “Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governmance terhadap integritas Laporan Keuangan” simposium Nasional Akuntansi VI Jal 1255-1273.

Ghozali, Imam, 2011 . Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 8) Cetakan ke VIII

Diana, Marsella, dan Malem (2015) “ Pengaruh Fee Audit, Pemberian Jasa Konsultasi Manajemen, Dan Lamanaya Hubungan Penugasan Audit Terhadap Independensi Akuntan Publik (Studi Empiris Di Ksntor Akuntan Publik Di Jakarta)